



## Policy Brief: Reposisi Pendidikan Kepramukaan sebagai Platform Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan Dasar

Masduki Asbari<sup>1</sup>, Agus Purwanto<sup>2</sup>, Yoyok Cahyono<sup>3</sup>, Temmy Setiawan<sup>4</sup>, Khaerul Fahmi<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Insan Pembangunan Indonesia, Indonesia

<sup>2,4,5</sup>Tanry Abeng University, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Pramita Indonesia, Indonesia

<sup>1,2,3,4,5</sup>Asosiasi Doktor Tangerang Raya, Indonesia

Corresponding Author Email: [kangmasduki.ssi@gmail.com](mailto:kangmasduki.ssi@gmail.com)

**Abstrak** - Pendidikan karakter pada satuan pendidikan dasar merupakan fondasi strategis pembangunan sumber daya manusia, namun implementasinya masih menghadapi persoalan fragmentasi kebijakan dan lemahnya integrasi nilai dalam praktik keseharian siswa. Pendidikan karakter kerap direduksi menjadi program normatif dan simbolik, sementara instrumen pendidikan yang berpotensi kuat—pendidikan kepramukaan—belum dimanfaatkan secara optimal dalam kerangka kebijakan pendidikan daerah. Artikel ini bertujuan merumuskan *policy brief* akademik mengenai reposisi pendidikan kepramukaan dari sekadar ekstrakurikuler wajib menjadi platform kebijakan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis kebijakan (*policy analysis*) berbasis kajian dokumen, literatur ilmiah mutakhir, serta refleksi empiris diskursus kebijakan pendidikan daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendidikan kepramukaan memiliki keunggulan filosofis, pedagogis, dan kelembagaan untuk berfungsi sebagai ekosistem pendidikan karakter yang terintegrasi dalam budaya sekolah. Kebaruan artikel ini terletak pada pergeseran paradigma kebijakan yang menempatkan kepramukaan sebagai arsitektur karakter berbasis pengalaman, pembiasaan, dan keteladanan, bukan sekadar program tambahan. *Policy brief* ini merekomendasikan reposisi regulatif kepramukaan, penguatan *governance* pendidikan karakter, integrasi nilai ke dalam praktik sekolah sehari-hari, serta pengembangan sistem evaluasi karakter berbasis perubahan perilaku. Temuan ini diharapkan menjadi rujukan strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pendidikan karakter yang berkelanjutan dan berdampak.

**Kata Kunci:** pendidikan karakter; kebijakan pendidikan; kepramukaan; sekolah dasar; *governance* pendidikan

**Abstract** - Character education at the primary education level constitutes a strategic foundation for long-term human capital development; however, its implementation remains constrained by policy fragmentation and weak integration of values into students' daily practices. Character education is often reduced to normative and symbolic programs, while one of the most potent educational instruments—scouting education—has not been optimally positioned within local education policy frameworks. This article aims to develop an academic policy brief that reframes scouting education from a mandatory extracurricular activity into a strategic policy platform for strengthening character education in primary schools. The study adopts a qualitative approach using policy analysis, drawing on regulatory documents, recent scholarly literature, and empirical reflections from local education policy discourse. The findings indicate that scouting education possesses strong philosophical, pedagogical, and institutional advantages to function as an integrated character education ecosystem embedded within school culture. The novelty of this article lies in its policy reframing approach, which positions scouting education as a character architecture grounded in experiential learning, habituation, and moral exemplarity rather than as an auxiliary program. This policy brief recommends regulatory repositioning of scouting education, strengthening character education governance, integrating scouting values into everyday school practices, and developing behavior-based character evaluation systems. These findings offer strategic insights for local governments in formulating sustainable and impactful character education policies.

**Keywords:** character education; education policy; scouting education; primary schools; education governance



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Pendidikan karakter telah lama diakui sebagai inti dari proses pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar yang berfungsi sebagai fondasi pembentukan kepribadian, nilai, dan orientasi hidup peserta didik (Astra et al., 2024; Fajar & Nurhayati, 2023; Triningsih & Mawardi, 2019). Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia jangka panjang, pendidikan karakter tidak dapat dipahami sekadar sebagai pelengkap pendidikan kognitif, melainkan sebagai dimensi esensial yang menentukan kualitas manusia, kohesi sosial, dan keberlanjutan peradaban. Namun demikian, praktik pendidikan karakter di satuan pendidikan dasar di Indonesia—khususnya di tingkat daerah—masih menghadapi berbagai tantangan struktural, kultural, dan kebijakan yang menyebabkan implementasinya belum optimal (Hakim & Ananda, 2025; Hamidah & Nisak, 2022; Hidayah et al., 2023).

Secara empiris, berbagai fenomena sosial menunjukkan adanya kegamangan dalam pembentukan karakter generasi muda. Meningkatnya perilaku indisipliner, menurunnya empati sosial, rendahnya tanggung jawab kolektif, serta melemahnya etos kebangsaan pada usia sekolah dasar menjadi indikator bahwa pendidikan karakter belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan keseharian siswa (Asbari & Novitasari, 2024b, 2024a; Subandi et al., 2024). Fenomena ini tidak sepenuhnya dapat diselesaikan melalui pendekatan kurikuler formal yang berfokus pada transfer pengetahuan dan pencapaian akademik semata. Pendidikan karakter menuntut pendekatan yang lebih mendalam, berkelanjutan, dan berbasis pengalaman hidup (*experiential*).

Dalam kerangka kebijakan pendidikan (R. Indonesia, 2010), pendidikan karakter sering kali direduksi menjadi program normatif yang bersifat simbolik. Ia diwujudkan dalam slogan, visi-misi sekolah, atau kegiatan insidental seperti upacara, peringatan hari besar, dan proyek tematik jangka pendek. Akibatnya, pendidikan karakter tidak tumbuh sebagai budaya sekolah (*school culture*), melainkan berhenti pada tataran administratif dan seremonial. Kondisi ini diperparah oleh kecenderungan kebijakan pendidikan yang terlalu menitikberatkan pada capaian akademik terukur, sehingga dimensi afektif dan moral kerap terpinggirkan.

Pada titik inilah muncul kebutuhan mendesak untuk melakukan reframing kebijakan pendidikan karakter, khususnya pada satuan pendidikan dasar. Pendidikan karakter perlu ditempatkan kembali sebagai inti (*core*) dari sistem pendidikan (P. R. Indonesia, 2017; R. Indonesia, 2003), bukan sebagai tambahan (*add-on*). Reframing ini tidak hanya menuntut perubahan pendekatan pedagogis, tetapi juga reposisi instrumen kebijakan yang telah tersedia namun belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu instrumen tersebut adalah pendidikan kepramukaan.

Pendidikan kepramukaan memiliki posisi unik dalam sistem pendidikan Indonesia (Pendidikan et al., 2024). Ia bukan institusi baru, bukan pula program temporer yang lahir dari tren kebijakan sesaat. Kepramukaan telah mengakar secara historis, sosial, dan kultural sebagai wahana pembentukan karakter generasi muda. Nilai-nilai yang terkandung dalam Tri Satya dan Dasa Dharma Pramuka mencerminkan prinsip-prinsip universal pendidikan karakter: ketakwaan, kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, kepedulian sosial, cinta tanah air, dan kemandirian (Hidayah et al., 2023; Mawardini & Wibowo, 2024; Nugraha et al., 2023). Lebih dari itu, kepramukaan memiliki metodologi khas yang menempatkan pengalaman, keteladanan, dan pembiasaan sebagai inti proses belajar.

Namun demikian, dalam praktik kebijakan pendidikan kontemporer, kepramukaan justru mengalami marginalisasi peran. Ia lebih sering diposisikan sebagai ekstrakurikuler wajib yang berdiri di luar arus utama proses pendidikan. Kegiatan kepramukaan dibatasi oleh jadwal mingguan, bergantung pada ketersediaan pembina, dan sering kali tidak terintegrasi dengan visi pendidikan sekolah secara keseluruhan. Akibatnya, potensi besar kepramukaan sebagai wahana pendidikan karakter justru tidak teraktualisasi secara maksimal.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan kebijakan (*policy gap*) antara tujuan ideal pendidikan karakter dan instrumen implementasinya di tingkat sekolah. Di satu sisi, kebijakan pendidikan nasional dan daerah menekankan pentingnya penguatan karakter peserta didik. Di sisi lain, instrumen yang paling dekat dengan praktik pembentukan karakter—yakni kepramukaan—belum ditempatkan secara strategis dalam desain kebijakan pendidikan. Kesenjangan inilah yang menjadi titik tolak artikel *policy brief* ini.

Dari perspektif *state of the art*, berbagai penelitian pendidikan karakter menegaskan bahwa pendekatan yang efektif bukanlah pendekatan instruksional semata, melainkan pendekatan berbasis pengalaman, relasi sosial, dan pembiasaan nilai dalam konteks nyata. Pendidikan karakter yang berhasil selalu ditopang oleh ekosistem yang memungkinkan peserta didik mengalami nilai secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, kepramukaan memiliki kesesuaian metodologis yang

tinggi dengan prinsip-prinsip pendidikan karakter modern, termasuk pembelajaran sosial-emosional dan pendidikan berbasis nilai.

Meski demikian, sebagian besar kajian sebelumnya masih memosisikan kepramukaan pada level pedagogis atau program sekolah, bukan pada level kebijakan (*policy level*). Penelitian tentang kepramukaan cenderung membahas manfaatnya bagi pengembangan sikap siswa, kepemimpinan, atau keterampilan sosial, tetapi belum banyak yang mengkaji kepramukaan sebagai platform kebijakan pendidikan karakter yang terintegrasi dengan *governance* pendidikan daerah. Dengan kata lain, terdapat kekosongan kajian pada level kebijakan publik yang menjembatani antara potensi kepramukaan dan desain kebijakan pendidikan karakter yang sistemik.

Artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Berbeda dari kajian konseptual atau evaluatif semata, artikel ini disusun dalam format *policy brief* akademik, yang bertujuan langsung memengaruhi cara pandang dan pengambilan keputusan para pemangku kebijakan pendidikan daerah. Fokus utama artikel ini adalah reposisi pendidikan kepramukaan—yakni pergeseran peran kepramukaan dari sekadar kegiatan ekstrakurikuler menuju platform kebijakan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan dasar.

Reposisi ini tidak dimaksudkan sebagai penambahan beban kebijakan atau perluasan program baru, melainkan sebagai penataan ulang (*realignment*) terhadap instrumen yang telah ada. Dengan reposisi yang tepat, kepramukaan dapat berfungsi sebagai simpul integratif yang menyatukan berbagai inisiatif pendidikan karakter yang selama ini berjalan terpisah, mulai dari pembiasaan disiplin, penguatan nilai kebangsaan, hingga pengembangan kepemimpinan dan kepedulian sosial siswa.

Dalam konteks *governance* pendidikan daerah, reposisi kepramukaan juga memiliki implikasi strategis (Tangerang, 2011, 2024). Pendidikan karakter tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada sekolah tanpa dukungan kebijakan yang jelas. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyediakan kerangka regulasi, dukungan sumber daya, serta mekanisme evaluasi yang memastikan pendidikan karakter berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Tanpa dukungan tersebut, pendidikan karakter akan tetap bergantung pada inisiatif individual sekolah dan guru, yang sering kali bersifat sporadis dan tidak merata.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk: (1) menganalisis secara kritis posisi pendidikan kepramukaan dalam kebijakan pendidikan karakter di satuan pendidikan dasar; (2) merumuskan kerangka konseptual reposisi kepramukaan sebagai platform kebijakan pendidikan karakter; dan (3) menyusun rekomendasi kebijakan yang implementatif bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pendidikan. Kebaruan (*novelty*) artikel ini terletak pada pendekatan kebijakan yang menempatkan kepramukaan bukan sebagai objek program, melainkan sebagai arsitektur kebijakan karakter berbasis sekolah.

Dengan pendekatan tersebut, artikel ini diharapkan tidak hanya memperkaya diskursus akademik tentang pendidikan karakter dan kepramukaan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi perumusan kebijakan pendidikan daerah yang lebih berorientasi pada pembentukan manusia seutuhnya. Dalam konteks tantangan sosial dan pendidikan yang semakin kompleks, reposisi pendidikan kepramukaan menjadi bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan sebuah keniscayaan strategis.

## METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun dalam kerangka *policy brief* akademik, yaitu suatu bentuk tulisan ilmiah yang bertujuan untuk menjembatani hasil analisis akademik dengan kebutuhan praktis pengambilan keputusan kebijakan publik. Berbeda dengan artikel penelitian empiris konvensional yang berorientasi pada pengujian hipotesis, *policy brief* menekankan pada analisis masalah kebijakan, penilaian opsi kebijakan, serta perumusan rekomendasi yang relevan, kontekstual, dan implementatif. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini dirancang secara khusus untuk menjawab kebutuhan analisis kebijakan pendidikan, khususnya terkait penguatan pendidikan karakter melalui reposisi pendidikan kepramukaan pada satuan pendidikan dasar.

### Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis kebijakan (*policy analysis*). Pendekatan kualitatif dipilih karena isu yang dikaji bersifat kompleks, normatif, dan kontekstual, serta berkaitan dengan nilai, institusi, dan praktik kebijakan pendidikan. Analisis kebijakan digunakan untuk memahami bagaimana suatu masalah publik didefinisikan, bagaimana instrumen kebijakan yang ada bekerja, serta bagaimana alternatif kebijakan dapat dirumuskan secara lebih efektif.

Dalam konteks *policy brief*, analisis kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai kerangka reflektif dan preskriptif yang menghasilkan rekomendasi kebijakan. Oleh karena itu, artikel ini tidak bertujuan untuk menggeneralisasi temuan secara statistik, melainkan untuk menghasilkan insight kebijakan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan pendidikan daerah dalam merumuskan atau menyempurnakan kebijakan pendidikan karakter.

### Unit Analisis dan Fokus Kebijakan

Unit analisis dalam *policy brief* ini adalah kebijakan pendidikan karakter pada satuan pendidikan dasar, dengan fokus khusus pada posisi dan peran pendidikan kepramukaan dalam kerangka kebijakan pendidikan daerah. Analisis difokuskan pada relasi antara tujuan kebijakan (penguatan karakter), instrumen kebijakan (kepramukaan), dan konteks implementasi (sekolah dasar dan *governance* pendidikan daerah).

Fokus kebijakan meliputi:

1. Kerangka normatif pendidikan karakter dalam kebijakan pendidikan,
2. Posisi struktural pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan dasar,
3. Praktik implementasi kepramukaan di sekolah,
4. Kesenjangan antara tujuan kebijakan dan praktik lapangan,
5. Potensi reposisi kepramukaan sebagai platform kebijakan karakter.

Dengan fokus tersebut, *policy brief* ini berupaya menelaah kebijakan tidak hanya sebagai dokumen formal, tetapi sebagai proses sosial dan institusional yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, dan nilai.

### Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sebagai *policy brief* akademik, artikel ini tidak mengandalkan satu jenis data tunggal, melainkan menggunakan triangulasi sumber data kebijakan untuk memperkuat validitas analisis. Sumber data utama meliputi:

1. Dokumen Kebijakan dan Regulasi. Dokumen yang dianalisis mencakup kebijakan pendidikan nasional dan daerah yang relevan dengan pendidikan karakter dan kepramukaan, seperti regulasi kurikulum, pedoman pendidikan karakter, serta kebijakan daerah terkait pembinaan peserta didik. Analisis dokumen bertujuan untuk mengidentifikasi arah kebijakan, prioritas, serta ruang kebijakan yang tersedia bagi penguatan peran kepramukaan.
2. Literatur Ilmiah. Kajian literatur dilakukan terhadap artikel jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi dalam kurun waktu 5–10 tahun terakhir yang membahas pendidikan karakter, *experiential learning*, pendidikan berbasis nilai, serta kepramukaan. Literatur ini digunakan untuk membangun landasan teoretis dan akademik bagi analisis kebijakan.
3. Refleksi Empiris dan Diskursus Kebijakan. Data pendukung diperoleh dari refleksi empiris penulis atas diskursus kebijakan pendidikan daerah, termasuk forum diskusi kebijakan (*Focus Group Discussion*), dialog pemangku kepentingan, serta praktik implementasi pendidikan karakter di sekolah dasar. Refleksi ini digunakan bukan sebagai data statistik, melainkan sebagai konteks empiris yang memperkaya analisis kebijakan.

### Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan *thematic policy analysis*, yaitu teknik analisis kualitatif yang berfokus pada identifikasi tema-tema kebijakan utama yang muncul dari dokumen, literatur, dan refleksi empiris. Tahapan analisis meliputi:

1. *Problem Structuring*. Tahap ini bertujuan merumuskan masalah kebijakan secara sistematis, yakni mengidentifikasi kesenjangan antara tujuan penguatan pendidikan karakter dan praktik implementasinya di satuan pendidikan dasar. Masalah kebijakan diposisikan bukan semata sebagai kekurangan teknis, tetapi sebagai persoalan desain kebijakan dan tata kelola.
2. *Policy Mapping*. Pada tahap ini dilakukan pemetaan instrumen kebijakan yang ada, khususnya pendidikan kepramukaan, untuk melihat bagaimana posisinya dalam sistem pendidikan dan sejauh mana ia dimanfaatkan sebagai instrumen kebijakan karakter. Pemetaan ini mencakup dimensi normatif, kelembagaan, dan operasional.
3. *Policy Gap Analysis*. Analisis kesenjangan kebijakan dilakukan dengan membandingkan tujuan normatif pendidikan karakter dengan praktik implementasi kepramukaan di sekolah. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi area-area di mana kebijakan belum berjalan efektif atau belum didukung oleh desain kelembagaan yang memadai.

4. Formulasi Opsi Kebijakan. Berdasarkan analisis kesenjangan, artikel ini merumuskan beberapa opsi kebijakan yang memungkinkan, mulai dari mempertahankan status quo hingga melakukan reposisi strategis kepramukaan sebagai platform pendidikan karakter. Setiap opsi dianalisis secara kualitatif dari sisi implikasi, peluang, dan keterbatasannya.
5. Rekomendasi Kebijakan (*Policy Recommendation*). Tahap akhir analisis adalah perumusan rekomendasi kebijakan yang bersifat preskriptif dan implementatif. Rekomendasi dirumuskan dengan mempertimbangkan konteks *governance* pendidikan daerah, kapasitas institusi, serta keberlanjutan kebijakan.

### **Keabsahan Analisis dan Pertimbangan Etis**

Keabsahan analisis dalam *policy brief* ini dijaga melalui triangulasi sumber, konsistensi argumentasi, serta keterkaitan logis antara masalah, analisis, dan rekomendasi kebijakan. Karena penelitian ini tidak melibatkan subjek manusia secara langsung, pertimbangan etis lebih difokuskan pada integritas akademik, akurasi interpretasi kebijakan, serta tanggung jawab normatif dalam merumuskan rekomendasi publik.

### **Keterbatasan Metodologis**

Sebagai *policy brief* akademik, artikel ini memiliki keterbatasan pada tidak digunakannya data kuantitatif atau survei berskala besar. Namun keterbatasan ini bersifat inheren pada tujuan *policy brief*, yang lebih menekankan pada kedalaman analisis kebijakan dan relevansi rekomendasi dibandingkan generalisasi statistik. Oleh karena itu, temuan dan rekomendasi dalam artikel ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan kebijakan, bukan sebagai kesimpulan final yang bersifat universal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini menyajikan hasil analisis kebijakan pendidikan karakter pada satuan pendidikan dasar dengan fokus pada posisi dan potensi pendidikan kepramukaan sebagai instrumen kebijakan. Pembahasan diarahkan untuk menjawab persoalan utama yang telah dirumuskan pada bagian pendahuluan, yakni kesenjangan antara tujuan normatif penguatan pendidikan karakter dan praktik implementasinya di tingkat sekolah. Analisis dilakukan dengan menempatkan pendidikan kepramukaan dalam perspektif kebijakan publik dan *governance* pendidikan daerah.

### **Pendidikan Kepramukaan dalam Lanskap Kebijakan Pendidikan Karakter**

Hasil analisis menunjukkan bahwa pendidikan kepramukaan memiliki posisi paradoksal dalam kebijakan pendidikan (Ridho & Suryadi, 2023; Suhendra & Kurniawan, 2023; Sumaryanto & Hidayat, 2025). Di satu sisi, kepramukaan diakui secara formal sebagai bagian dari sistem pendidikan dan diwajibkan pada satuan pendidikan dasar. Di sisi lain, dalam praktik kebijakan dan manajemen sekolah, kepramukaan belum diperlakukan sebagai instrumen strategis pendidikan karakter. Ia lebih sering diposisikan sebagai kegiatan tambahan yang berdiri di luar arus utama pembelajaran dan budaya sekolah.

Paradoks ini mencerminkan persoalan klasik dalam kebijakan pendidikan karakter, yaitu adanya pengakuan normatif tanpa penguatan struktural. Kepramukaan memiliki legitimasi regulatif, tetapi tidak diiringi dengan desain kebijakan yang menjadikannya sebagai platform integratif pembentukan karakter. Akibatnya, nilai-nilai kepramukaan—seperti disiplin, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan kepemimpinan—tidak terinternalisasi secara konsisten dalam keseharian siswa.

Dalam konteks ini, kepramukaan sesungguhnya memiliki keunggulan kebijakan yang jarang dimiliki oleh instrumen pendidikan lainnya. Kepramukaan mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui pengalaman nyata. Pendidikan karakter tidak diajarkan sebagai konsep abstrak, tetapi dialami secara langsung melalui aktivitas, relasi sosial, dan tantangan kolektif. Namun keunggulan ini menjadi tidak optimal ketika kebijakan pendidikan memperlakukannya secara perifer.

### **Analisis Kesenjangan Kebijakan (*Policy Gap Analysis*)**

Analisis kesenjangan kebijakan menunjukkan bahwa masalah utama bukan terletak pada absennya program pendidikan karakter, melainkan pada fragmentasi kebijakan. Pendidikan karakter tersebar dalam berbagai inisiatif—kurikulum, proyek tematik, tata tertib sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler—tanpa simpul integratif yang kuat. Kepramukaan, yang sejatinya dapat berfungsi sebagai simpul tersebut, justru tidak difungsikan secara strategis.

Kesenjangan ini diperparah oleh beberapa faktor. Pertama, tidak adanya kerangka kebijakan daerah yang secara eksplisit menempatkan kepramukaan sebagai platform pendidikan karakter. Kedua, lemahnya integrasi antara kegiatan kepramukaan dan budaya sekolah sehari-hari. Ketiga, keterbatasan kapasitas pembina kepramukaan dalam menerjemahkan nilai menjadi praktik pedagogis yang konsisten. Keempat, absennya indikator evaluasi karakter yang berbasis perubahan perilaku.

Akibat dari kesenjangan ini adalah rendahnya dampak pendidikan karakter terhadap perilaku nyata siswa. Pendidikan karakter menjadi bersifat deklaratif, bukan transformatif. Sekolah memiliki banyak program, tetapi tidak memiliki arah karakter yang terintegrasi.

### **Opsi Kebijakan Pendidikan Karakter Berbasis Kepramukaan**

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa opsi kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pendidikan.

Opsi pertama adalah mempertahankan status quo, yakni kepramukaan tetap diposisikan sebagai ekstrakurikuler wajib tanpa perubahan desain kebijakan. Opsi ini relatif mudah dilaksanakan karena tidak menuntut perubahan struktural. Namun dampaknya terhadap penguatan pendidikan karakter cenderung minimal dan tidak berkelanjutan. Pendidikan karakter akan tetap terfragmentasi dan bergantung pada inisiatif individual sekolah atau pembina.

Opsi kedua adalah penguatan program kepramukaan secara terbatas, misalnya dengan menambah jam kegiatan, anggaran, atau pelatihan pembina. Opsi ini memiliki potensi meningkatkan kualitas kegiatan kepramukaan, tetapi masih belum menyentuh akar persoalan kebijakan. Kepramukaan tetap berada pada level program, bukan platform. Fragmentasi kebijakan masih berlanjut, meskipun dalam intensitas yang lebih baik.

Opsi ketiga—yang menjadi rekomendasi utama dalam *policy brief* ini—adalah reposisi strategis pendidikan kepramukaan sebagai platform kebijakan penguatan pendidikan karakter. Reposisi ini berarti menjadikan kepramukaan sebagai kerangka integratif yang menyatukan berbagai inisiatif pendidikan karakter dalam budaya sekolah. Kepramukaan tidak lagi dipahami sebagai kegiatan tambahan, melainkan sebagai arsitektur nilai yang menjiwai proses pendidikan sehari-hari.

Reposisi ini tidak menuntut penambahan program baru, tetapi penataan ulang peran dan fungsi kepramukaan dalam sistem pendidikan. Dengan reposisi tersebut, kepramukaan menjadi titik temu antara kebijakan, praktik sekolah, dan pembentukan karakter siswa.

### **Implikasi Tata Kelola Pendidikan Daerah**

Reposisi kepramukaan sebagai platform kebijakan pendidikan karakter memiliki implikasi signifikan terhadap *governance* pendidikan daerah. Pertama, diperlukan kepemimpinan kebijakan yang kuat dari pemerintah daerah untuk menetapkan arah dan prioritas pendidikan karakter. Tanpa kepemimpinan ini, reposisi kepramukaan akan berhenti sebagai wacana akademik tanpa daya transformasi.

Kedua, reposisi ini menuntut sinergi antar-aktor kebijakan, mulai dari dinas pendidikan, dewan pendidikan, sekolah, hingga organisasi kepramukaan. Pendidikan karakter tidak dapat dijalankan secara sektoral. Ia memerlukan kolaborasi lintas institusi yang didukung oleh kerangka kebijakan yang jelas.

Ketiga, *governance* pendidikan daerah perlu menggeser fokus evaluasi pendidikan dari sekadar capaian akademik menuju keseimbangan antara prestasi dan karakter. Reposisi kepramukaan membuka ruang bagi pengembangan indikator evaluasi karakter yang lebih kontekstual dan berbasis perilaku nyata.

Keempat, reposisi ini menuntut perubahan cara pandang terhadap peran guru dan pembina. Pembina kepramukaan tidak lagi sekadar pelaksana kegiatan, tetapi menjadi agen utama pendidikan karakter. Hal ini menuntut penguatan kapasitas, pengakuan peran, dan dukungan kebijakan yang memadai.

### **Comparative Insight: Praktik Pendidikan Karakter Berbasis Pengalaman**

Secara komparatif, praktik pendidikan karakter di berbagai negara menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pengalaman dan pembiasaan memiliki dampak yang lebih kuat dibanding pendekatan instruksional. Pendidikan karakter yang berhasil selalu terintegrasi dalam budaya institusi pendidikan dan didukung oleh kebijakan yang konsisten.

Dalam konteks ini, kepramukaan memiliki kesetaraan dengan berbagai model pendidikan karakter berbasis pengalaman yang diterapkan secara internasional, seperti pendidikan kepemimpinan berbasis komunitas, pembelajaran layanan masyarakat, dan pendidikan kewargaan aktif. Namun

kepramukaan memiliki keunggulan tambahan karena telah terlembaga secara nasional dan memiliki legitimasi sosial yang kuat.

*Comparative insight* ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan pada relevansi kepramukaan, melainkan pada keberanian kebijakan untuk memaksimalkan potensinya. Daerah yang mampu mereposisi kepramukaan sebagai platform karakter akan memiliki keunggulan strategis dalam membangun generasi muda yang berkarakter kuat dan berdaya saing.

### **Rekomendasi Kebijakan yang Berdampak**

Berdasarkan hasil analisis, artikel ini merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan yang bersifat strategis dan implementatif.

Pertama, pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan eksplisit yang menempatkan pendidikan kepramukaan sebagai platform penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan dasar. Kebijakan ini dapat dituangkan dalam regulasi daerah atau pedoman operasional yang memberikan arah jelas bagi sekolah.

Kedua, kepramukaan perlu diintegrasikan ke dalam budaya sekolah melalui pembiasaan nilai dalam keseharian siswa. Nilai-nilai kepramukaan tidak hanya diajarkan dalam kegiatan khusus, tetapi dihidupkan dalam tata tertib, praktik pembelajaran, dan interaksi sosial di sekolah.

Ketiga, penguatan kapasitas pembina kepramukaan harus menjadi prioritas kebijakan. Pelatihan pembina tidak hanya berfokus pada teknis kegiatan, tetapi juga pada pedagogi karakter dan kepemimpinan nilai. Pengakuan peran pembina sebagai agen pendidikan karakter perlu diwujudkan dalam kebijakan penghargaan dan pengembangan profesional.

Keempat, pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem evaluasi pendidikan karakter yang berbasis perubahan perilaku, bukan sekadar kehadiran atau partisipasi kegiatan. Evaluasi ini harus bersifat formatif dan mendukung pembelajaran berkelanjutan.

Kelima, reposisi kepramukaan perlu disertai dengan strategi komunikasi kebijakan yang melibatkan orang tua dan masyarakat. Pendidikan karakter tidak dapat dibatasi pada ruang sekolah. Dukungan keluarga dan lingkungan sosial menjadi faktor kunci keberhasilan kebijakan.

Jika rekomendasi ini diterapkan secara konsisten, dampaknya tidak hanya terbatas pada peningkatan kualitas pendidikan karakter, tetapi juga pada penguatan kohesi sosial, peningkatan kualitas kepemimpinan muda, dan pembentukan budaya pendidikan yang berorientasi pada nilai. Dalam jangka panjang, reposisi pendidikan kepramukaan sebagai platform kebijakan karakter akan menjadi investasi strategis bagi pembangunan sumber daya manusia daerah dan nasional.

### **KESIMPULAN**

Penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan dasar merupakan agenda kebijakan strategis yang tidak dapat ditunda dan tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan parsial, simbolik, atau temporer. Analisis dalam *policy brief* ini menunjukkan bahwa problem utama pendidikan karakter bukan terletak pada ketiadaan program, melainkan pada lemahnya desain kebijakan yang mampu mengintegrasikan nilai ke dalam praktik keseharian siswa. Pendidikan karakter masih terfragmentasi, sementara instrumen yang paling potensial—pendidikan kepramukaan—belum dimanfaatkan secara optimal dalam kerangka kebijakan pendidikan.

Pendidikan kepramukaan memiliki keunggulan filosofis, pedagogis, dan kelembagaan untuk direposisi sebagai platform kebijakan penguatan pendidikan karakter. Dengan pendekatan berbasis pengalaman, pembiasaan, dan keteladanan, kepramukaan memungkinkan internalisasi nilai secara kontekstual dan berkelanjutan. Namun potensi tersebut hanya akan berdampak signifikan apabila kepramukaan dipindahkan dari posisi perifer sebagai ekstrakurikuler wajib menuju pusat ekosistem pendidikan karakter yang menjwai budaya sekolah.

*Policy brief* ini menegaskan bahwa reposisi pendidikan kepramukaan bukan sekadar inovasi program, melainkan transformasi paradigma kebijakan. Reposisi tersebut menuntut keberanian pemerintah daerah untuk menetapkan arah kebijakan yang jelas, memperkuat *governance* pendidikan karakter, mengintegrasikan kepramukaan dalam praktik sekolah sehari-hari, serta membangun sistem evaluasi karakter yang berbasis perubahan perilaku. Tanpa dukungan kebijakan yang kuat dan konsisten, pendidikan karakter akan terus bergantung pada inisiatif individual yang tidak merata dan sulit berkelanjutan.

Dengan demikian, pendidikan kepramukaan perlu dipahami sebagai investasi kebijakan jangka panjang dalam pembangunan manusia seutuhnya. Reposisi ini tidak hanya berpotensi meningkatkan kualitas karakter peserta didik, tetapi juga memperkuat kohesi sosial, kepemimpinan generasi muda,

dan daya tahan moral masyarakat. Dalam konteks *governance* pendidikan daerah, menjadikan kepramukaan sebagai platform kebijakan pendidikan karakter bukan lagi pilihan opsional, melainkan sebuah keniscayaan strategis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asbari, M., & Novitasari, D. (2024a). Pengaruh Kepemimpinan, Inovasi, dan Pembelajaran Organisasi terhadap Performa Individu dan Kelompok: Sebuah Kajian Literatur. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 03(06), 74–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.4444/jisma.v3i6.1148>
- Asbari, M., & Novitasari, D. (2024b). Unlocking Organizational Potential through Transformational Leadership: A Literature Review on Innovation and Performance. *International Journal of Social and Management Studies*, 06(06), 49–69.
- Astra, N. P. B., Raharjo, T. J., & Sulaiman. (2024). Scout extracurricular curriculum management in improving student discipline: Evidence from Indonesian schools. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v5i1.810>
- Fajar, D. W., & Nurhayati, S. (2023). Implementation of character education through scout extracurricular activities in forming student discipline. *Indonesian Journal of Primary Education*. <https://doi.org/10.17509/ijpe.v7i2.68194>
- Hakim, I., & Ananda, A. (2025). Scouting program as a strategy to cultivate early discipline and responsibility. *Madrasah: Journal of Islamic Educational Management*. <https://doi.org/10.32940/mjiem.v1i0.2>
- Hamidah, & Nisak, Z. H. (2022). Experience learning model for elementary schools: Self-leadership strengthening through experiential learning. *Journal of Integrated Elementary Education*, 2(1), 63–71. <https://doi.org/10.21580/jieed.v2i1.10725>
- Hidayah, E. N., Murdiono, M., Wiratomo, G. H., & Hermawan, D. (2023). The role of youth and scouting education in enhancing student character development. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(1), 94–103. <https://doi.org/10.21831/jc.v20i1.47673>
- Indonesia, P. R. (2017). Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/73167/perpres-no-87-tahun-2017>
- Indonesia, R. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Indonesia, R. (2010). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. (Sumber salinan publik). <https://peraturan.bpk.go.id> (rujukan metadata dan akses dokumen)
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/224172/permendikbudriset-no-5-tahun-2022>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/281847/permendikbudriset-no-12-tahun-2024>
- Mawardini, M., & Wibowo, A. (2024). The role of scouting education in building the character of elementary school students: A scout leader's perspective. *EduBase: Journal of Basic Education*. <https://doi.org/10.47453/edubase.v6i1.3094>
- Nugraha, M. A., Zuwirna, E. M., Z., & Ananda, A. (2023). The establishment of a disciplined character development module through scouting extracurriculars. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(11), 10115–10127. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v9i11.5680>
- Pemerintah Kabupaten Tangerang. (2011). *Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang*. JDIH Kabupaten Tangerang. <https://jdih.tangerangkab.go.id/dokumen/detail/109229>



- Pemerintah Kabupaten Tangerang. (2024). *Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kepemudaan*.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/379630/Perda%20Kabupaten%20Tangerang%20Nomor%205%20Tahun%202024.pdf>
- Pendidikan, K., Kebudayaan, R., & Indonesia, T. R. (2024). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/281847/permendikbudriset-no-12-tahun-2024>
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka*.  
<https://peraturan.bpk.go.id>
- Ridho, A. M. Y., & Suryadi, D. (2023). Outdoor education model based on experiential learning in character education for junior high school students. *Global Journal of Innovation and Knowledge*.  
<https://doi.org/10.21009/gjik.072.02>
- Subandi, E., Asbari, M., & Anggraeni, V. (2024). Educational Scout: Pramuka Sebagai Wadah Pendidikan Karakter Bangsa. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 03(05), 30–32.
- Suhendra, D. I., & Kurniawan, R. (2023). Pengaruh outdoor education terhadap peningkatan kepercayaan diri siswa SMP. *Jurnal Keolahragaan Dan Pendidikan (JKP)*.  
<https://doi.org/10.25157/jkp.v11i2.18557>
- Sumaryanto, R., & Hidayat, A. (2025). Integrating multicultural education through experiential learning: Implications for character and citizenship. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v17i1.6524>
- Tangerang, P. K. (2011). Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang. JDIH Kabupaten Tangerang. <https://jdih.tangerangkab.go.id/dokumen/detail/109229>
- Tangerang, P. K. (2024). Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kepemudaan. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/379630/Perda Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2024.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/379630/Perda%20Kabupaten%20Tangerang%20Nomor%205%20Tahun%202024.pdf)
- Triningsih, R., & Mawardi, M. (2019). Pembelajaran berbasis karakter pada siswa sekolah dasar: Penguatan disiplin, tanggung jawab, dan kepemimpinan. *Jurnal Riset Pendidikan Dan Pembelajaran (JRPP)*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v2i1.271>